

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pemerataan Pendapatan di Indonesia

Achmad Sidqiy^{a*}, Syamsul Amar^a

^aJurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: sid_qiy@yahoo.co.id

Info Artikel

Diterima:

3 Januari 2020

Disetujui:

9 Maret 2020

Terbit daring:

4 Mei 2020

DOI:

<https://doi.org/10.24036/ecosains.11549957.00>

Sitasi:

Sidqiy, A., & Amar, S. (2020). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pemerataan Pendapatan di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 9(1), 48-57.

Abstract

This research illustrates the influence of economic growth, domestic investment and government expenditure to distribution income in Indonesia with variables (1) GDP per capita, (2) Domestic Investment and (3) Government Expenditure. This research uses panel data from 2012-2017, which consist 32 province in Indonesia, by using a method linear regression and use Fixed Effect Model (FEM). the results obtained from this research is (1) Economic growth has a negative significant effect to inequality income in Indonesia. (2) Domestic investment has negative effect but not significant to inequality income in Indonesia. (3) Government expenditure has a positive and significant effect to inequality income in Indonesia

Keywords: *Inequality Income, Economic Growth, Domestic Investment, and Government Expenditure*

Abstrak

Penelitian ini menggambarkan pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi domestik dan pengeluaran pemerintah terhadap pemerataan pendapatan di Indonesia dengan variabel (1) PDRB perkapita, (2) Investasi Domestik dan (3) Pengeluaran Pemerintah. Data ini menggunakan data panel dari tahun penelitian 2012 – 2017, yang terdiri dari 32 provinsi di Indonesia, dengan menggunakan metode regresi linear dan menggunakan model Fixed Effect Model (FEM). Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah (1) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. (2) Investasi Domestik berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. (3) Pengeluaran pemerintah berpengaruh positive dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia

Kata Kunci : Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Domestik, dan Pengeluaran Pemerintah

Kode Klasifikasi JEL: O15; O11; E22

PENDAHULUAN

Pada negara sedang berkembang, banyak sekali permasalahan yang sering ditemukan salah satunya yaitu ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan. Dimana masalah distribusi pendapatan ini mengukur jarak perbedaan pendapatan antara satu individu dengan individu lainnya. Jika ketidakseimbangan ini terus terjadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, maka terjadilah suatu persoalan dimana pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Ketidakmerataan dalam pendistribusian pendapatan inilah yang disebut sebagai ketimpangan, dan dalam mengukur ketimpangan ini menggunakan Koefisien gini (Gini Ratio) yang mana koefisien gini tersebut mengukur seberapa besar kesenjangan dari distribusi pendapatan antar penduduk, di Indonesia ketimpangan masih merupakan masalah yang kerap dihadapi,

Menurut Damanik A. (2018) Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar diantara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan

sempurna). dimana ketimpangan mengacu terhadap seberapa jauh pendapatan tersebut di distribusikan secara merata diantara masyarakat. Ketimpangan pendapatan juga bisa di definisikan sebagai kesenjangan diantara yang kaya dan yang miskin. Ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan serta penanggulangan ialah salah satu faktor dari semua permasalahan pembangunan dan merupakan tujuan utama dari kebijakan pembangunan di banyak negara, Oleh karena itu aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang sangat penting yang harus masuk kedalam radar pemerintah, bagaimana pemerintah memainkan kebijakannya untuk mengatasi ketimpangan pendapatan, dalam hal ini pemerintah mengintervensinya lewat kebijakan untuk menekan angka ketimpangan di Indonesia.

Disamping itu pemerintah juga memiliki peran dalam menciptakan iklim investasi di daerah-daerah yang kurang dapat perhatian karena biasanya investasi hanya terkonsentrasi pada daerah yang sudah maju. Ketika investasi mulai masuk ke daerah-daerah yang kurang maju tersebut memiliki dampak baik terhadap pendapatan masyarakat setempat seperti terbukanya lapangan kerja dalam rangka memproduksi barang dan jasa sehingga masyarakat memiliki pendapatan dan meningkatkan daya belinya sehingga memperkecil jarak ketimpangan pendapatan dengan masyarakat di daerah yang sudah maju.

Tabel 1. Gini Rasio, PDRB perkapita, Investasi Domestik, dan Pengeluaran Pemerintah, di Indonesia Tahun 2012 sampai 2017

Tahun	Gini Ratio	PDRB perkapita	Laju	Investasi Domestik	Laju	Pengeluaran Pemerintah	Laju
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
2012	0,410	34.114.310	-	92.182.20	-	176.955.310	-
2013	0,413	37.219.188	9,10	128.150.70	39,02	213.868.925	20,86
2014	0,406	40.510.460	8,84	155.483.70	21,33	257.008.911	20,17
2015	0,408	43.622.950	7,68	178.544.08	14,83	276.605.049	7,62
2016	0,397	46.403.105	6,37	212.873.60	19,23	286.025.537	3,41
2017	0,393	50.196.103	8,17	261.444.90	22,81	323.461.805	13,08

Sumber: BPS, 2018

Pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa gini rasio selama periode 2012-2017 di Indonesia cenderung mengalami fluktuasi terhitung 6 tahun dalam periode dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Ketimpangan yang menarik terjadi pada tahun 2013 yaitu mencapai 0,413. Angka tersebut merupakan angka tertinggi namun angka kemiskinan di Indonesia justru mengalami penurunan, faktor yang mempengaruhi tingginya ketimpangan pada tahun 2013 ini bukan dari masyarakat miskin yang bertambah miskin akan tetapi terjadi disebabkan ketidakseimbangan laju kekayaan diantara masyarakat kelas atas dengan masyarakat bawah, sederhananya meskipun angka kemiskinan turun namun permasalahannya bukan pada kemiskinan namun laju kekayaan masyarakat kelas bawah tidak mampu mengimbangi laju kekayaan kelas atas sehingga terjadi disparitas pendapatan yang cukup jauh.

Sedangkan ketimpangan terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,393 oleh pengaruh dari kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk dari kelompok 40 persen terbawah dan 40 persen kelompok menengah. Pendapatan dari 2 kelompok tersebut sekarang lebih cepat dibandingkan kelompok penduduk 20 persen atas, yang mana pada tahun 2013 kasus serupa terjadi namun sebaliknya, kenaikan pendapatan tersebut berdampak terhadap penurunan ketimpangan di tahun tersebut.

Pada Tabel 1 memperlihatkan pertumbuhan PDRB perkapita cenderung berfluktuasi dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Laju pertumbuhan PDRB perkapita tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 8,17 % hal seiring dengan penurunan angka ketimpangan pendapatan terendah di tahun tersebut. Selain itu membaiknya pendapatan perkapita pada tahun ini juga dapat dilihat dari sektor investasi yang berangsur naik dari tahun-tahun

sebelumnya yang dapat dilihat pada data penelitian sehingga memberikan kontribusi besar terhadap sektor penyerapan tenaga kerja yang berimplikasi terhadap pendapatan masyarakat.

Sedangkan untuk laju pertumbuhan PDRB perkapita terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 6,37 % hal tersebut dikarenakan pada tahun 2016 tersebut, PDB yang masih terkonsentrasi dipulau Jawa, yang mana provinsi ibukota menjadi kontributor terbesar diikuti dengan provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Hal ini dengan masih terpusatnya sektor-sektor seperti sektor sekunder dan sektor tersier di pulau Jawa. Sedangkan sektor primer lebih berkontribusi pada daerah-daerah diluar pulau Jawa.

Berdasarkan Tabel 1 bisa dilihat bahwasannya laju pertumbuhan investasi mengalami fluktuasi dalam kurun 5 tahun terakhir. Laju pertumbuhan Investasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 39,02% hal ini dikarenakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membenahi bagian diantaranya, penguatan pelayanan terpadu satu pintu pada bidang penanaman modal baik dipusat maupun daerah, dikarenakan adanya penguatan pelayanan terpadu satu pintu tersebut lebih memudahkan penanam modal dalam mengurus perizinan dan sekaligus menyerap tenaga kerja

Sedangkan investasi terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 14,83% diiring dengan angka ketimpangan yang stagnan dari tahun sebelumnya, hal ini salah satunya dikarenakan mata uang Indonesia mengalami depresiasi. Terdepresiasinya mata uang rupiah dikarenakan meningkatnya resiko investasi domestik yang tergambar pada naiknya angka Credit Default Swap (CDS) dari tahun sebelumnya, hal tersebut berpengaruh terhadap penanam modal untuk berinvestasi.

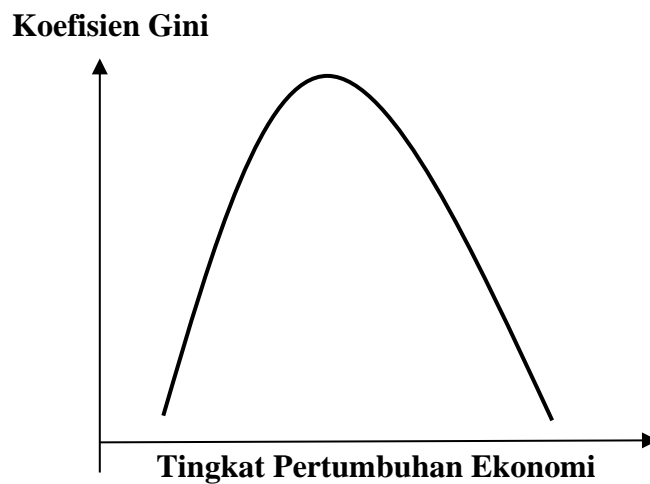
Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan pengeluaran pemerintah cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir, laju pengeluaran pemerintah tertinggi terjadi di tahun 2013 yaitu sebesar 20,86% hal ini dikarenakan adanya perubahan pada anggaran belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Sedangkan laju pengeluaran pemerintah terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu hanya sebesar 3,41% walaupun tingkat pertumbuhan pengeluaran pemerintah rendah tetapi diiringi dengan menurunnya angka ketimpangan pada tahun tersebut, turunnya laju pengeluaran pemerintah karena lesunya kegiatan ekspor dan impor ditengah lesunya perekonomian global. Namun alokasinya pengeluaran pemerintah mampu mengurangi ketimpangan hal ini dikarenakan fokusnya pemerintah mengalokasikan belanjanya terhadap sektor infrastruktur seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara termasuk bandara perintis agar konektivitas dan pemerataan antar wilayah menjadi lebih baik, dan pada tahun tersebut kondisi perekonomian mulai membaik dari tahun sebelumnya, hal ini memperjelas mengapa ketimpangan mengalami penurunan pada tahun tersebut.

TINJAUAN LITERATUR

Ketimpangan pendapatan merupakan suatu masalah adanya jarak perbedaan pada pendapatan antar masyarakat atau wilayah yang sudah maju dengan wilayah yang masih tertinggal. Semakin lebar jarak antar pendapatan maka juga akan semakin besar juga variasi pada pendistribusian pendapatan yang pada akhirnya akan menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan. Hal ini tidak dapat untuk dihindari dikarenakan adanya efek merembes kebawah (*trickle down effect*) dari output secara sempurna. Hasil dari output nasional tersebut hanya dinikmati oleh sedikit kalangan orang dengan maksud dan tujuan tertentu (Damanik A.,2018).

Menurut Amar S. (2015) Ketimpangan Pendapatan merupakan perbedaan pada pendapatan yang diperoleh masyarakat, sehingga terjadinya perbedaan pada pendapatan masyarakat yang mencolok. Dengan lain kata ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan dalam jumlah pendapatan yang didapat oleh masyarakat sehingga berakibat terhadap terjadinya perbedaan pendapatan yang lebih lebar diantara kalangan masyarakat tersebut. Hal tersebut berakibat kepada si kaya semakin menjadi kaya dan si miskin menjadi miskin

Menurut Isnowati S. (2007) Hubungan antara kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi bisa dijelaskan dengan Kuznets Hypothesis. Hipotesis itu diawali dengan pertumbuhan ekonomi, yang pada awalnya naik di tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah hingga mencapai suatu tingkat pertumbuhan tertentu yang selanjutnya menurun. Adapun Hipotesis Kuznets tersebut bila digambarkan akan tampak seperti gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Kurva U-Terbalik Kuznets

Gini Ratio merupakan salah satu teknik statistik dalam mengukur ketimpangan pendapatan. Angka pada Gini Ratio sebagai indikator dalam ketimpangan pendapatan memiliki jarak nilai antara angka 0 (nol) dan 1 (satu). Gini Ratio sama dengan 0 (nol) menunjukkan bahwa ketimpangan tersebut rendah (pemerataan sempurna) sedangkan angka 1 (satu) menunjukkan bahwa sebaran ketimpangan tersebut tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro dalam Heryanah (2017) memaparkan ukuran ketimpangan dalam tabel sebagai berikut:

Table 2. Indikator Ketimpangan Gini Ratio

Distribusi Pendapatan	Tingkat Ketimpangan
<i>Gini Ratio</i> berkisar diantara 0,50 - 0,70	Tinggi
<i>Gini Ratio</i> berkisar diantara 0,36 - 0,49	Sedang
<i>Gini Ratio</i> berkisar diantara 0,20 - 0,35	Rendah

Penelitian Huang et al. (2015) menyatakan bahwasannya hubungan diantara ekonomi dengan ketimpangan pendapatan bisa positif dan juga bisa negatif. Pada negara yang berpendapatan rendah (low-income developng countries) terdapat hubungan yang negatif

antara ketimpangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi. Dan sebaliknya pada negara berpenghasilan tinggi (high-income developing countries) terdapat hubungan positif antara ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi (Amri K.,2017)

Investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran yang memiliki tujuan menambah modal dan memperoleh keuntungan pada waktu tertentu. Terpusatnya investasi hanya pada beberapa daerah akan menjadi faktor yang penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan (Purbadharmaja I.,2017)Hartini N. (2017) Investasi memiliki keterkaitan dengan kelangsungan kegiatan ekonomi dimasa depan. Hal ini dikarenakan pada proses produksi barang dan jasa meningkat yang pada gilirannya hal tersebut akan menyerap angkatan kerja. Sehingga tenaga kerja mendapatkan upah dan diiringi dengan kemampuan daya beli. Semakin banyaknya investasi yang digunakan guna melakukan proses produksi barang dan jasa, yang mana tenaga kerja dapat terserap lebih banyak sehingga terjadi pemerataan pendapatan perkapita

Danawati S. (2016), Pengeluaran pemerintah adalah salah satu alat bagi pemerintah dalam melakukan campur tangan terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Pengeluaran pemerintah merupakan konsumsi pemerintah atas barang-barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah serta pembiayaan yang dilaksanakan pemerintah untuk kebutuhan administrasi pemerintahan serta kegiatan - kegiatan pembangunan.

Suindyah S. (2009) Pengeluaran pemerintah ialah seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau putusan yang dilakukan oleh pemerintah untuk penyediaan barang-barang publik dan pelayanan terhadap masyarakat. Pengeluaran pemerintah (Government Expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besaran penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada setiap tahunnya yang tercantum dalam APBN untuk skala nasional dan APBD untuk skala daerah atau wilayah.

METODE PENELITIAN

Data yang dipergunakan berupa data panel yang merupakan gabungan antara data time series dan data cross section. Dengan kata lain data panel ini merupakan unit-unit individu yang sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Analisis regresi panel digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Variabel bebas meliputi PDRB perkapita, investasi domestik, pengeluaran pemerintah. Model yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y_{it} = \text{Log}(X_{1it}) + \text{Log}(X_{2it}) + \text{Log}(X_{3it}) + U_{it} \quad (1)$$

Dimana Y_{it} adalah Ketimpangan Pendapatan, X_{1it} adalah PDRB perkapita, X_{2it} adalah Investasi Domestik, X_{3it} adalah Pengeluaran Pemerintah, dan U_{it} adalah Error Term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil model regresi menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi (X_1) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan (Y) di Indonesia dengan koefisien regresi sebesar -0,112659 hal ini berarti apabila pertumbuhan ekonomi meningkat satu persen maka ketimpangan (Y) akan meningkat menurun 0,112659 persen. Artinya semakin meningkatnya pertumbuhan

ekonomi maka ketimpangan pendapatan semakin menurun di Indonesia dengan asumsi *ceteris paribus*

Hal ini dapat diartikan bahwasannya dengan meningkatnya pendapatan perkapita, pendistribusian pendapatan di Indonesia semakin merata antar penduduk. Fenomena tersebut lebih di dominasi penurunan tingkat ketimpangan di daerah perkotaan dan dari kelompok menengah, kelompok kelas menengah tersebut sangat berperan terhadap perekonomian di Indonesia, hal ini dikarenakan kelas menengah yang merupakan konsumen utama dalam perekonomian. Hal tersebut diungkapkan data Bank Dunia sebesar 44 persen konsumsi berasal dari kelas menengah, fenomena tersebut merupakan sinyal positif untuk permasalahan ketimpangan pendapatan yang mana hal tersebut menggambarkan menguatnya daya beli masyarakat. Selain itu kelas menengah juga berkontribusi terhadap pencipta lapangan kerja di Indonesia hal ini dibuktikan dengan 42 persen menurut usaha yang karyawannya digaji datang dari kelas menengah, sehingga penyerapan tenaga kerja tersebut berdampak baik terhadap pendapatan masyarakat.

Melihat fenomena ini sejalan dengan Penelitian ini Arka dan Yasa (2015) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah telah berhasil menciptakan pertumbuhan yang tinggi melalui pemanfaatan sektor-sektor ekonomi pada setiap daerah. Pertumbuhan ekonomi yang dilakukan secara serentak berhasil menciptakan dalam pemerataan distribusi pendapatan sehingga mengurangi kesenjangan pendapatan tersebut. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan Kuznets dalam Agusalm, (2016) yang mana teori Kuznets tentang hubungan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan bernama Hipotesis U terbalik. Yang mana Kuznets menyatakan bahwa pada awal pertumbuhan ekonomi ketimpangan yang semakin tinggi, namun pada tahap tertentu kesenjangan distribusi pendapatan akan menurun.

Tabel 3. Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.322550	0.192858	6.857639	0.0000
LOG(X1)	-0.112659	0.024367	-4.623378	0.0000
LOG(X2)	-0.000289	0.001228	-0.235635	0.8140
LOG(X3)	0.014035	0.006304	2.226365	0.0274

Pengaruh Investasi Domestik Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil model regresi memperlihatkan bahwa Investasi Domestik (X2) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan (Y) di Indonesia dengan koefisien regresi sebesar -0,000289. Hal ini berarti apabila tingkat investasi meningkat satu persen maka ketimpangan akan turun 0,000289 persen. Artinya semakin meningkat investasi maka ketimpangan pendapatan semakin menurun di Indonesia dengan asumsi *ceteris paribus*

Fenomena ini menggambarkan bahwa investasi domestik di Indonesia berhasil menurunkan ketimpangan, namun, walaupun investasi berhasil menurunkan angka ketimpangan tetapi kontribusi investasi tersebut belum cukup berpengaruh dalam menurunkan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hal ini di karenakan fokusnya pemerintah dalam bidang investasi di Indonesia, ditandai dengan fokus pemerintah dalam

membenahi pelayanan pada bidang penanaman modal baik di pusat maupun di daerah sehingga mempermudah perizinan bagi investor di Indonesia.

Namun investasi tersebut belum efektif dalam menurunkan angka ketimpangan, karena investasi hanya masih terpusat di daerah yang sudah maju seperti perkotaan. sehingga tenaga kerja yang terserap serta manfaat lain dari investasi tersebut juga berbanding lurus dengan investasi yang terkonsentrasi pada satu tempat. Fenomena tersebut dibuktikan dengan konsistennya tren sektor penanaman modal dalam negeri pada awal tahun penelitian sampai akhir tahun penelitian yang lebih di dominasi dari sektor industri ketimbang sektor pertanian. Hal ini dibuktikan. Pada tahun 2012 industri pengolahan manufaktur mendapat porsi sebesar 54,1% sektor jasa sebesar 23,8%, dan diikuti dengan sektor pertambangan 11,4%. Sedangkan pada sektor pertanian seperti tanaman pangan dan perkebunan hanya mendapatkan porsi sebesar 10,4% dan diikuti sektor kehutanan dan sektor peternakan masing-masing sebesar 0,2% dan 0,1%, dan sektor perikanan merupakan sektor paling kecil hanya sebesar 0,0%.

Trend realisasi penanaman modal dalam negeri ini tidak banyak berubah dari awal tahun penelitian sampai dengan akhir tahun penelitian seperti pada tahun 2017 yang mana sektor industri manufaktur dan jasa masih menjadi sektor yang paling diminati penanam modal dalam negeri, hal ini dibuktikan masing-masing menyumbang sebesar 37,5% dan 45,8% diiringi dengan sektor pertambangan sebesar 10,2%. Sedangkan pada sektor tanaman dan perkebunan 6,2% diikuti dengan sektor peternakan 0,3%, Perikanan dan sektor kehutanan masing-masing hanya sebesar 0,0%. Hal tersebut menjelaskan bahwasannya penanaman modal dalam negeri yang lebih didominasi sektor industri, sedangkan penanaman modal pada sektor agrikultur masih tertinggal, dimana sektor agrikultur merupakan sektor mayoritas masyarakat bekerja. Lebih banyaknya minat investor menanam modal di sektor industri ketimbang pada sektor agrikultur ini adalah penyebab yang membuat kurang optimalnya peran penanaman modal dalam negeri dalam menurunkan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Penelitian ini sejalan dengan Khoir Akfina Didia (2016) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan penyebabnya adalah peran pemerintah dalam memicu tumbuhnya investasi di daerah masih perlu ada peningkatan lagi yang dikemudian hari akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi kesenjangan pembangunan

Penelitian ini juga sejalan dengan Fitrah dan Nugroho (2018) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan permintaan terhadap modal investasi rendah pada daerah-daerah dimana perkembangannya yang sangat lambat hal ini sebagai akibat rendahnya penawaran modal dan pendapatan yang cenderung semakin merendah

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil model regresi memperlihatkan bahwa Pengeluaran Pemerintah (X_3) berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan (Y) di Indonesia dengan koefisien regresi sebesar 0,014035. Hal ini berarti apabila tingkat pengeluaran pemerintah meningkat satu persen maka ketimpangan akan naik 0,014035 persen. Artinya semakin meningkat pengeluaran pemerintah maka ketimpangan pendapatan semakin meningkat di Indonesia dengan asumsi ceteris paribus

Pada tahun 2012 belanja pegawai hanya sebesar 19,58 % diiringi pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 19,49 % dan kembali mengalami peningkatan pada tahun

2014 sebesar 20,25%. Namun pada sektor subsidi dan bantuan sosial pada tahun 2012 yaitu sebesar 34,28 % dan 7,48% untuk tahun 2012 dan pada tahun 2013 subsidi 31,22% dan bansos 8,10% dan pada tahun 2014 sebesar 32,57 dan 8,14% yang artinya pemerintah masih fokus dalam aspek pemerataan dalam penggunaan dananya.

Namun pada tahun 2015 belanja pegawai naik menjadi 23,76% diiring tahun 2016 sebesar 26,44% dan tahun 2017 sebesar 24,9% namun hal ini berbanding terbalik dengan sektor subsidi yang anjlok. Sektor subsidi hanya mendapat porsi sebesar 15,72 % dari yang sebelumnya mencapai angka 32,57% dan terus menurun sampai tahun 2017 sampai sebesar 12,4 % sedangkan untuk dana bantuan sosial yang tidak banyak mengalami kenaikan namun mengalami penurunan porsi pada tahun 2016 dan 2017 yaitu sebesar 4,30%. Sedangkan laju pengeluaran pemerintah di sektor publik mengalami penurunan di tahun 2015 sebesar -1,68% dan yang terbesar di tahun 2016 sebesar -2,47%.

Dalam hal ini faktor yang mempengaruhi arah kebijakan pemerintah adalah terjadinya pergantian kekuasaan di tahun 2014 sehingga arah kebijakan pemerintah dari pemerintahan sebelumnya dapat dirasakan pada tahun pertengahan tahun penelitian. Hal ini menggambarkan tidak cermatnya pemerintah dalam mengambil kebijakan sehingga pengeluaran pemerintah lebih cenderung memperparah ketimpangan. Selain itu pada tahun penelitian juga banyak praktik penyelewengan dana, contohnya seperti dana desa, seperti pemotongan anggaran dan pekerjaan fiktif yang berakibat pada pemanfaatan dana guna pemerataan pembangunan yang semestinya didapat oleh desa tersebut tidak efektif atau sama sekali tidak dirasakan.

Penelitian ini sejalan dengan Danawati dkk (2016) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan pengeluaran pemerintah belum mampu menurunkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Pengeluaran yang tergolong dalam belanja sektor publik yang mustinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat menurunkan ketimpangan pendapatan dalam penelitian ini mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan pengeluaran pemerintah belum sepenuhnya terjangkau atau dinikmati oleh masyarakat secara langsung

Penelitian ini juga sejalan dengan Wahyuni dkk (2014) yang mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan yang mana pengeluaran pemerintah hanya membuat ketimpangan semakin timpang, hal ini karena pemerintah hanya fokus meningkatkan anggaran tetapi tidak diiringi dengan alokasi pengelolaan pengeluaran pemerintah tepat sasaran terutama pada rakyat miskin yang tidak merasakan program-program pemerintah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan analisis regresi panel untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Artinya, semakin meningkat pertumbuhan ekonomi maka ketimpangan pendapatan akan menurun dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya pada hasil estimasi, investasi domestik berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Artinya semakin meningkat investasi maka ketimpangan pendapatan akan menurun dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di

Indonesia. Artinya semakin meningkat pengeluaran pemerintah maka ketimpangan pendapatan juga akan semakin meningkat dan begitupun sebaliknya.

Hasil estimasi menjelaskan bahwa Pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Artinya setiap perubahan yang terjadi pada variabel bebas seperti pdrb perkapita, investasi domestik dan pengeluaran pemerintah akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia

Penelitian ini membahas pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan. Sehingga disarankan agar pemerintah terus mampu menjaga konsistensi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam wujud perbaikan pendapatan perkapita dan diiringi dengan pemerataan pendapatan pada masyarakat. Diantaranya dengan fokus pemerintah kepada daerah-daerah yang pendapatan perkapita masih rendah terutama pada daerah yang masih tertinggal.

Selanjutnya Pemerintah disarankan mampu membuat kebijakan dalam pembangunan investasi yang merata antar sektor. Melihat adanya permasalahan ketimpangan pada penanaman modal dalam negeri diantara sektor industri dengan sektor pertanian. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia yang bekerja pada sektor agrikultur, sehingga penanaman modal yang merata antar sektor akan berdampak optimal dalam mengatasi ketimpangan pendapatan.

Pemerintah juga lebih cermat dalam melakukan penyusunan anggaran dan memprioritaskan anggaran terutama pada sektor-sektor perekonomian masyarakat seperti sektor pendidikan dan kesehatan dan juga memperhatikan sektor kesejahteraan rakyat seperti subsidi dan bantuan sosial sehingga dana tersebut efektif dalam membangun sumber daya manusia dan disarankan hal tersebut dilakukan pada daerah-daerah yang PDRB perkapita nya masih rendah dan tepat pada sasaran dan tidak terjadi miss alokasi agar sumber daya manusia pada daerah tersebut tidak kalah dengan daerah yang sudah maju, sehingga tidak terkonsentrasi pada daerah yang sudah maju saja guna memperkecil ketimpangan pendapatan di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Alhudori, M. Sudirman. (2018). Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Of Economics and Business*. Vol 2 No.1
- Arsyad, Lincoln. (2004). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Danawati, Sri, I K.G. Bandesa, dan Made Suyana Utama. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol 5 No.7
- Damanik, Anggiat Mugabe, Zulgani dan Rosmeli. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*. Vol 7 No.1
- Didia, Khoir Akfani. Analisis Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Kedungsepur. *Economic Development Analysis Journal*. Vol 5 No.1
- Ekananda, Mahyus. 2016. *Analisis Ekonometrika Data Panel*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hanum, Nurlaila. Analisis Kemiskinan dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kota Langsa (Studi Kasus Gampong Matang Seulimeng). *Jurnal Samudra Ekonomika*. Vol 2 No.2
- Hartini, Nita Tri. Pengaruh PDRB Perkapita, Investasi dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi DIY Tahun 2011-2015. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*. Vol 6 No.6
- Heryanah. Kesenjangan Pendapatan di Indonesia Studi Empiris berdasarkan Susenas 2008, 2011 dan 2013. *Jurnal BPPK*. Vol 10 No.2

- Islami, Fitrah Sari dan Nugroho SBM. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. *Media Ekonomi dan Manajemen*. Vol 33 No.1
- Isnowati, Sri. Pengujian Hipotesis Kuznets di Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol 14 No.1
- Iswanto, Denny. Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. *Signifikan*. Vol 4 No.1
- Jhingan, M.L. 2008. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maidar, Rosti, Raja Masbar dan Muhammad Nasir. Analisis Tingkat Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Provinsi Aceh Periode 2002-2015. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia* Vol 4 No.1
- Syafri, Aufa Nadya. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia. *Media Ekonomi*. Vol 27 No.1
- Nugroho, Budi Satrio. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan. *Journal of Economics and Policy*. Vol 7 No.1
- Nurlina, dan T. Muhammad Iqbal Chaira. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*. Vol 1 No.2
- Pambudi, Eko Wicaksono dan Miyasto. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi (Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal Of Economics*. Vol 2 No.2
- Purbadharmaja, Ida Bagus Putu, Diah Pradnyadewi T. Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol 6 No.2
- Rizky, Reza Lainatul, Grisvia Agustin, Imam Mukhlis. Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan*. Vol 8 No.1
- Rukmana, Indra. Pengaruh Disparitas Pendapatan, Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah Tahun 1984-2009. *Economic Development Analysis Journal*. Vol 1 No.1
- Sitaniapessy, Harry A.P. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB dan PAD. *Jurnal Economica*. Vol 9 No.1
- Sjufri, Muchlis, Muh. Almunawir Mirsan, Nasir Hamzah. Pengaruh Investasi, PDRB perkapita, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Derajat Kemandirian Fiskal. Vol 2 No.2
- Suindyah, Sayekti. (2011). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Vol 15 No.4
- Wahyuni, I Gusti Ayu Putri, Made Sukarsa dan Nyoman Yuliarni. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol 3 No.8